

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Selama penulis menjalani praktik kerja magang selama 66 hari (1 September 2020 – 1 November 2020) di Litbang Kompas yang merupakan departemen penelitian milik PT Kompas Media Nusantara (Harian Kompas), penulis menjalani tugas sebagai riset atau *researcher* di departemen pusat data dan informasi untuk produk Kompaspedia dalam rubrik Profil untuk Profil Daerah. Profil daerah sendiri berisi informasi terkait sejarah, geografi, kependudukan, politik, kesejahteraan, pemerintahan, dan ekonomi dari suatu provinsi/kota/kabupaten.

Provinsi/kota/kabupaten yang hendak ditulis telah ditentukan oleh koordinator profil daerah, Antonius Purwanto. Tugas yang diberikan bukan tugas harian, melainkan mingguan karena proses riset yang memakan waktu lama. Tugas tersebut dikumpulkan setiap hari Jumat. Riset yang dilakukan penulis berasal dari sumber-sumber kredibel seperti buku sejarah, jurnal penelitian, data dari situs milik Badan Pusat Statistik (BPS) tiap-tiap provinsi/kota, berita Kompas.com, kumpulan data di Kompasdata, situs resmi pemerintah, dan sumber-sumber kredibel lainnya. Dalam proses riset sangat dilarang menggunakan data dari sumber tidak terpercaya atau dari media selain Kompas. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat

akurasi data dan agar dapat mempertanggungjawabkan semua data yang tertulis dalam berita nantinya.

Ditempatkan di Kompaspedia dalam rubrik Profil Daerah penulis secara langsung dibimbing dan diawasi oleh Antonius Purwanto selaku koordinator Profil Daerah di Kompaspedia. Antonius Purwanto atau akrab dipanggil Mas Pur bertugas memberikan penugasan mengenai provinsi mana yang akan dibuat pada minggu tersebut. Seminggu sekali juga dilakukan evaluasi oleh koordinator dengan penulis. Dalam evaluasi biasanya membahas teknis penulisan, pemilihan kata, cara menyusun data agar lebih mudah dibaca, pemilihan sumber, akurasi data, dan penulisan referensi.

Penulisan biasanya diberikan langsung oleh koordinator, Antonius Purwanto (Mas Pur), kepada penulis melalui *Whatsapp* setiap hari Senin. Lalu, penulis akan langsung melakukan riset dari sumber-sumber kredibel yang telah disebutkan di atas. Jika dalam proses riset terdapat hambatan atau pertanyaan, peneliti akan langsung menanyakan kepada koordinator melalui *Whatsapp*. Jika penulis sudah selesai menuliskan berita tersebut, maka penulis akan mengirimkan artikel lewat surel. Jika ada revisi, biasanya koordinator akan memberitahukan pada hari Jumat atau Sabtu dan penulis akan merevisinya pada hari Senin.

3.2 Tugas yang Dilakukan

Dalam proses pembuatan konten Kompaspedia, diawali dengan penentuan topik besar dalam rapat redaksi yang antara Ignatius Kristanto sebagai *Manager* Litbang Kompas bersama dengan koordinator tiap-tiap rubrik. Lalu, koordinator

rubrik profil daerah yakni Antonius Purwanto atau akrab dipanggil Mas Pur memberitahukan profil mana yang akan dibuat kepada peserta magang. Kemudian, tiap-tiap penulis (peserta magang) akan ditugaskan untuk menulis profil masing-masing daerah. Pada minggu pertama dan kedua, penulis ditugaskan membuat profil provinsi Sumatera Barat. Pada minggu ketiga, penulis bertugas membuat profil provinsi Bengkulu. Untuk dapat membuat profil, harus dilakukan proses riset yang panjang. Sumber riset adalah buku sejarah, jurnal-jurnal penelitian baik dalam negeri maupun luar negeri, dan data dari Kompasdata.id.

Proses pengumpulan data/riset merupakan proses yang memakan waktu cukup lama. Penulis sendiri biasanya membutuhkan waktu 2-4 hari untuk bisa mendapatkan seluruh data yang diperlukan, sebelum akhirnya bisa menulis artikel profil provinsi tersebut. Demi menjaga kredibilitas dan keakuratan data, data yang boleh diambil dari artikel hanyalah dari artikel Kompasdata.id, tidak boleh mengambil data dari media lain apalagi dari sumber yang tidak jelas. Karena Kompaspedia mengutamakan keakuratan dan kedalaman berita, sehingga sumber-sumber yang disertakan harus kredibel dan data yang disajikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Setelah artikel selesai ditulis, artikel tersebut diserahkan ke koordinator (Antonius Purwanto) untuk kemudian di cek akurasi, kedalaman, dan teknik penulisannya. Jika ada yang perlu direvisi, koordinator akan mengirim kembali dan penulis akan memperbaiki tulisan tersebut hingga akhirnya layak untuk di unggah di laman Kompaspedia.

Dalam satu artikel profil daerah terdapat beberapa subtopik yang diahas. Namun, sebagai peserta magang, penulis baru ditugaskan untuk menulis sebagian

subtopik saja. Oleh karena itu, pekerjaan penulis selama magang sebagai *researcher* di Kompaspedia pada rubrik Profil Daerah sebagai berikut.

1. Melakukan riset sejarah terbentuknya provinsi

Sejarah dimulai dari zaman prasejarah, zaman kerajaan-kerajaan, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, setelah kemerdekaan, serta undang-undang berdirinya daerah tersebut.

2. Melakukan riset geografis provinsi

Riset letak geografis provinsi, batas-batas wilayah, luas wilayah, pegunungan, perikanan, pertambangan, perkebunan, pertanian, perairan, dan lain sebagainya.

3. Melakukan riset kependudukan

Riset jumlah penduduk, dominasi suku penduduk, dominasi agama penduduk, bahasa daerah, dan lain sebagainya.

4. Melakukan riset kesejahteraan

Riset data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi, Angka Harapan Hidup (AHH), Umur Harapan Hidup (UHH), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Gini Rasio, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dari data Badan Pusat Statistik provinsi tersebut.

5. Melakukan riset politik provinsi

Dimulai dari pemilu legislatif untuk DPR RI pertama tahun 1955, orde baru, hingga orde reformasi. Data yang diambil adalah perolehan suara partai Pemilu berikut jumlah perolehan suara dan persentasenya.

6. Melakukan riset ekonomi

Riset PDRB (Produk domestik regional bruto), PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, inflasi, nilai ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, dan sektor-sektor dominan.

7. Membuat deskripsi undang-undang

Memaparkan secara detail tentang isi undang-undang berdirinya provinsi tersebut.

8. Menulis artikel berdasarkan semua data yang telah diperoleh dengan menyertakan sumber kredibel.

Selain bertugas melakukan riset dan membuat berita profil daerah, peneliti juga ditugaskan untuk membuat deskripsi Undang-Undang Pembentukan Provinsi/Kota/Kabupaten. Deskripsi tersebut berupa informasi tentang judul Undang-undang, waktu disahkan dan diundangkannya Undang-undang, siapa yang mensahkan dan mengundangkan, dimana UU tersebut disahkan dan diundangkan, alasan pembentukan UU tersebut, penjabaran singkat terkait seluruh BAB atau pasal dalam UU, jumlah halaman dan pembagian BAB/halaman penjelas, ringkasan pasal-pasal yang menjadi poin utama, dan sumber berkas Undang-undang tersebut. Tujuan dibuatnya deskripsi Undang-undang adalah untuk memberi gambaran kepada pembaca sebelum membaca Undang-undang tersebut, agar lebih mudah dipahami dan dengan mudah mencari poin yang ingin dibaca.

Sebelum pandemi, tim yang melakukan riset dan menulis artikel biasanya melakukan riset di perpustakaan Kompas yang bertempat di lantai 4 gedung Kompas. Namun, semenjak pandemi berlangsung, Kompas hanya

memperbolehkan 20% karyawan per ruangan yang datang ke kantor. Adapun karyawan-karyawan yang diprioritaskan masuk kantor adalah karyawan dari divisi yang memang pekerjaannya harus dilakukan di kantor. Sedangkan, untuk divisi seperti riset bekerja di rumah (*work from home*). Sebenarnya, pekerjaan divisi riset tidak terlalu berubah atau dibebankan semenjak adanya pandemi. Dikarenakan biasanya riset juga dilakukan melalui internet, seperti buku-buku yang tersedia secara daring, jurnal-jurnal penelitian, data dari Kompasdata.id, dan data dari sumber terpercaya lainnya yang tersedia di internet. Hanya saja, terkadang buku yang ada di internet tidak tersedia untuk topik tertentu, atau sekalipun ada buku tersebut kurang lengkap isinya (ada beberapa halaman yang tidak tersedia). Sedangkan buku-buku di perpustakaan memang dirasa lebih lengkap.

Untuk merangkum serangkaian kegiatan penulis dari hari pertama hingga akhir periode magang, berikut rincian tugas yang dilakukan penulis per pekan.

Tabel 3.1 Rincian Tugas yang Dilakukan

Pekan	Tugas yang dilakukan
Pekan 1 (1 September – 4 September)	- Riset sejarah Provinsi Sumatera Barat - Menulis artikel sejarah Provinsi Sumatera Barat
Pekan 2 (7 September – 11 September)	- Revisi artikel sejarah Sumatera Barat - Riset sejarah, politik, dan ekonomi Sumatera Barat - Menulis artikel sejarah, politik, dan ekonomi Sumatera Barat
Pekan 3 (14 September – 18 September)	- Riset sejarah, politik, dan ekonomi Bengkulu - Menulis artikel sejarah, politik, dan ekonomi Bengkulu
Pekan 4 (21 September – 25 September)	- Riset sejarah, politik, dan ekonomi Kepulauan Riau - Menulis artikel sejarah, politik, dan ekonomi Kepulauan Riau - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Kepulauan Riau

Pekan 5 (28 September – 2 Oktober)	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sejarah, geografis, pemerintahan, politik, dan ekonomi Kalimantan Selatan - Menulis artikel sejarah, geografis, pemerintahan, politik, dan ekonomi Kalimantan Selatan - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Kalimantan Selatan
Pekan 6 (5 Oktober – 9 Oktober)	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sejarah, geografis, pemerintahan, politik, dan ekonomi Kalimantan Tengah - Menulis artikel sejarah, geografis, pemerintahan, politik, dan ekonomi Kalimantan Tengah - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Kalimantan Tengah
Pekan 7 (12 Oktober – 16 Oktober)	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sejarah, geografis, pemerintahan, politik, dan ekonomi Kalimantan Utara - Menulis artikel sejarah, geografis, pemerintahan, politik, dan ekonomi Kalimantan Utara - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Kalimantan Utara
Pekan 8 (19 Oktober – 23 Oktober)	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sejarah, geografis, pemerintahan, politik, dan ekonomi Sulawesi Utara dan Surabaya - Menulis artikel sejarah, geografis, pemerintahan, politik, dan ekonomi Sulawesi Utara dan Surabaya - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Sulawesi Utara dan Surabaya
Pekan 9 (26 Oktober – 30 Oktober)	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Sulawesi Tengah - Menulis artikel sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Sulawesi Tengah - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Sulawesi Tengah
Pekan 10 (2 November – 6 November)	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Sumatera Selatan - Menulis artikel sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Sumatera Selatan - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Sumatera Selatan

Pekan 11 (9 November – 13 November)	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Kalimantan Selatan - Menulis artikel sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Kalimantan Selatan - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Kalimantan Selatan
Pekan 12 (16 November – 20 November)	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Lampung - Menulis artikel sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Lampung - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Lampung
Pekan 13 (23 November – 30 November)	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Aceh - Menulis artikel sejarah, geografis, pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan, politik, dan ekonomi Aceh - Membuat deskripsi Undang-undang pembentukan Aceh

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

Selama menjalani praktek kerja magang di departemen riset Litbang Kompas yang bernaung di bawah PT Kompas Media Nusantara, penulis menempati posisi sebagai riset/*researcher* untuk produk Kompaspedia dalam rubrik Profil Daerah. Semua pekerjaan berikut proses-proses dan nilai-nilai yang ditekankan dalam pembuatan produk berita masih berhubungan dengan beberapa mata kuliah program studi Jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Dalam pelaksanaannya, penulis ditugaskan membuat artikel berbentuk *indepth* tentang profil daerah. Adapun profil daerah yang dimaksud bisa berupa

profil provinsi, kota, dan kabupaten. Berita *indepth* (*indepth news*) sendiri berarti berita yang membahas suatu topik secara mendalam dan detail, dengan sumber-sumber kredibel. Berita *indepth* dibagi lagi menjadi tiga jenis yaitu berita komprehensif, berita interpretatif, dan berita investigatif. Berita komprehensif berarti berita yang berisi laporan fakta berupa data tentang suatu topik. Berita komprehensif memandang fakta dari segala macam aspek, sehingga tidak berbentuk kumpulan fakta harian seperti *hardnews*. Berita komprehensif menggabungkan serpihan-serpihan fakta dari berbagai sumber dan menggabungkannya menjadi suatu berita dengan benang merah yang terlihat jelas. Selanjutnya, berita interpretatif merupakan pengembangan dari berita berjenis *straight news*. Berita interpretatif pada dasarnya merupakan *straight news* yang dikembangkan kembali dengan penambahan opini atau penelitian dari penulis, sehingga isinya lebih mendalam. Terakhir, berita investigatif merupakan berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan mendalam terhadap suatu topik. Tujuan berita investigasi adalah untuk membongkar atau mengungkap hal-hal tersembunyi di balik suatu kejadian yang dirasa merugikan masyarakat (Baksin, 2013, p.94).

Dalam pembuatan berita profil daerah, penulis sebagai *researcher* bertugas melakukan riset data kemudian menulis data-data tersebut menjadi sebuah berita. Penulis juga bertugas membuat deskripsi Undang-undang pembentukan provinsi/kota/kabupaten. Penugasan diberikan setiap hari Senin dan penulis diharuskan mengirim berita setiap hari Jumat. Proses dalam melakukan riset data memakan waktu hingga 2-4 hari kerja. Proses riset memakan waktu yang lebih lama

dibandingkan penulisan lantaran data yang didapatkan harus akurat, kredibel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam proses membuat artikel profil daerah, penulis merangkumnya menjadi empat tahap, sebagai berikut.

1. Penugasan (*data assignment*)

Penentuan topik yang akan diangkat beserta alasan memilih topik tersebut.

2. Pengumpulan Data (*data collecting*)

Proses pengumpulan data/riset yang dibutuhkan dalam berita. Data diambil dari sumber-sumber tertentu untuk kemudian diolah.

3. Penulisan (*data writing*)

Menyusun data-data yang telah diambil dan dievaluasi menjadi bentuk tulisan, grafik, diagram, infografik, dan lain sebagainya. Pada tahap ini diperhatikan cara penulisan yang tepat seperti penggunaan kata, penyusunan kalimat, penggunaan tanda baca, penempatan paragraf, dan lain-lain agar berita mudah dimengerti oleh pembaca.

4. Penyuntingan (*data editing*)

Proses melihat kembali tulisan yang telah dibuat untuk menemukan bagian-bagian yang bisa diperbaiki atau dihilangkan. Tujuan tahap penyuntingan adalah memposisikan jurnalis sebagai pembaca yang membaca hasil berita tersebut untuk menentukan apakah berita

tersebut sudah layak dikonsumsi masyarakat dan apakah berita tersebut mudah dimengerti oleh masyarakat.

Tugas kerja peneliti di Litbang Kompas terbagi menjadi dua yakni melakukan riset dan membuat berita beserta deskripsi Undang-undang. Mengacu pada tahapan di atas, dalam proses riset terdapat 2 tahap yakni penugasan dan pengumpulan data. Sedangkan tahap ke-3 dan ke-4 yakni tahap penulisan dan penyuntingan terdapat dalam proses penulisan berita profil daerah. Maka, peneliti membaginya ke dalam dua sub bab yaitu Riset Profil Daerah dan Penulisan Profil Daerah yang di dalamnya memaparkan keempat tahapan tersebut.

3.3.1 Tahap Penugasan

Dalam kerja magang di Litbang Kompas (Kompaspedia) sebagai researcher, penulis dididik dan diawasi oleh koordinator rubrik Profil Daerah di Kompaspedia yakni Antonius Purwato atau akrab dipanggil Mas Pur. Tugas penulis pada rubrik Profil Daerah adalah membuat artikel berbentuk indepth yang berisikan informasi terkait profil suatu provinsi/kota/kabupaten. Informasi-informasi yang disajikan antara lain sejarah, geografi, kependudukan, politik, kesejahteraan, pemerintahan, dan ekonomi dari provinsi/kota/kabupaten tersebut. Selain itu, penulis juga bertugas membuat deskripsi Undang-undang pembentukan provinsi.

Deskripsi tersebut berupa informasi tentang judul Undang-undang, waktu disahkan dan diundangkannya Undang-undang, siapa yang mensahkan dan mengundang, dimana UU tersebut disahkan dan diundangkan, alasan pembentukan UU tersebut, penjabaran singkat terkait seluruh BAB atau pasal

dalam UU, jumlah halaman dan pembagian BAB/halaman penjelas, ringkasan pasal-pasal yang menjadi poin utama, dan sumber berkas Undang-undang tersebut.

Mengenai provinsi mana yang akan dibuat artikelnya, semua sudah ditentukan oleh Ignatius Kristanto selaku manajer departemen Pusat Data dan Informasi bersama dengan dan Antonius Puwanto selaku koordinator rubrik Profil Daerah di Kompaspedia. Penugasan oleh Antonius Purwanto (Mas Pur) diberikan kepada penulis setiap hari Senin. Selama melaksanakan magang, penulislah yang menghubungi Antonius Purwanto melalui *Whatsapp* untuk menanyakan provinsi mana yang minggu ini akan dibuat. Penulis menghubungi Antonius Purwanto setiap hari Senin pukul 08:00 pagi, dan Antonius Purwanto selaku pembimbing penulis akan langsung memberitahukan provinsi mana yang akan ditulis minggu ini.

Misalnya, pada Minggu, 22 November 2020 penulis menghubungi pembimbing melalui *Whatsapp* untuk menanyakan artikel provinsi mana yang harus penulis buat untuk minggu tersebut yang mana minggu tersebut merupakan pekan magang ke-13 (23 November – 30 November). Terlepas dari hari kerja (Senin-Jumat), pembimbing juga beberapa kali menghubungi penulis di hari Sabtu dan Minggu. Maka, penulis juga terkadang menanyakan tugas selanjutnya kepada pembimbing di hari Minggu. Setelah bertanya melalui *Whatsapp*, pembimbing memberitahu penulis bahwa provinsi yang harus ditulis artikelnya pada minggu itu adalah Provinsi Aceh. Namun, saat itu penulis juga diminta untuk merevisi artikel provinsi di minggu sebelumnya yakni Provinsi Lampung. Pembimbing saat itu meminta penulis untuk mendahulukan revisi artikel Lampung, baru mengerjakan artikel Aceh.

Selamat pagi, Mas Pur. Hari ini aku mengerjakan artikel provinsi mana ya mas?

Pagi Bella, Aceh ya. Tapi sebelum nya tolong diperbaiki yg Lampung ya.

Maka, penulis merevisi artikel Lampung di hari Minggu dan mengumpulkan artikel tersebut melalui surel di hari Senin, 23 November 2020 pagi pukul 06:00 pagi. Penulis sengaja mengirimkan revisi artikel Lampung di pagi hari agar di hari yang sama penulis langsung bisa mengerjakan artikel Aceh. Dalam pengerjaan seluruh tugas magang, penulis hanya berkoordinasi dengan pembimbing Antonius Purwanto. Maka, pada hari Senin, 23 November 2020 penulis mulai mengerjakan artikel Provinsi Aceh. Proses selanjutnya akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data

Setelah mendapatkan penugasan untuk menulis profil daerah Provinsi Aceh, hal pertama yang penulis lakukan adalah melakukan pengumpulan data atau riset. Riset sendiri berasal dari bahasa Latin “*re*” yang artinya lagi dan “*cercier*” yang artinya mencari. Secara umum, riset berarti mencari informasi tentang sesuatu, atau bisa juga diartikan dengan menemukan sesuatu. Proses riset dilakukan secara sistematis, hati-hati, dan cermat guna mendapatkan suatu hasil yang akurat. Proses riset merupakan proses yang sangat penting dalam ilmu komunikasi. Proses

komunikasi sendiri bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (Kriyantono, 2004, p.1-4).

Selama masa pandemi Covid-19, seluruh kegiatan riset dilakukan melalui internet. Sumber-sumber diambil dari buku-buku di Google Buku, jurnal penelitian, dan situs-situs resmi milik pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), situs resmi provinsi, berita dari Kompas.com dan Kompasid, dan sumber-sumber kredibel lainnya.

Riset pertama dimulai dari bagian Sejarah dan Pemerintahan. Pada proses riset Sejarah. Penulis bertugas mencari sejarah Provinsi Aceh mulai dari zaman prasejarah di Aceh termasuk penemuan-penemuan barang prasejarah seperti artefak, manusia pertama yang tinggal di Aceh, budaya hidup berkelompok, dan penemuan prasejarah lainnya, kemudian berlanjut ke zaman kerajaan-kerajaan di Aceh, zaman penjajahan Belanda di Aceh, zaman penjajahan Jepang, awal kemerdekaan, hingga terbentuknya provinsi Aceh. Untuk bagian Pemerintahan, penulis melakukan riset data daftar gubernur Aceh sejak awal didirikan hingga gubernur terakhirnya.

Data riset sejarah diambil melalui buku sejarah, jurnal penelitian, artikel dari Kompas, atau bisa juga dari situs resmi provinsi Aceh. Dalam penulisan artikel provinsi Aceh bagian sejarah, penulis mencari data dari Google Buku dan Google Cendikia. Penulis mendapatkan data mengenai zaman prasejarah Aceh dari buku karangan Arfan Diansyah berjudul “Prasejarah Indonesia” dan buku karangan Muhammad Ibrahim berjudul “Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh”.

Gambar 3.1 Buku Sumber Riset Penulis



Sumber: Google Buku

Gambar 3.2 Buku Sumber Riset Penulis



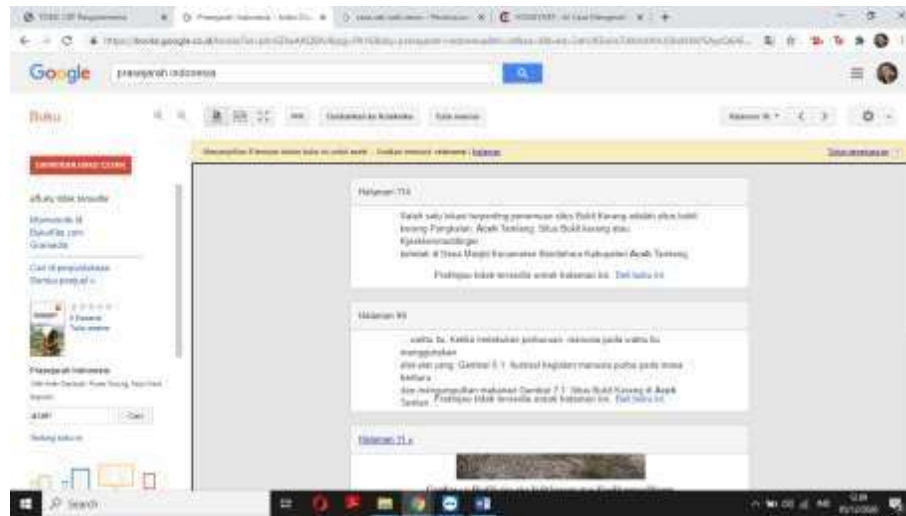
Sumber: Google Buku

Di dalam buku-buku tersebut dijelaskan bahwa di wilayah Aceh telah ditemukan benda-benda peninggalan zaman prasejarah berupa bukit kerang (*Kjokkenmoddinger*) yang kini diberi nama situs Bukit Kerang Pangkalan, artefak-artefak dan fosil manusia, binatang serta tumpukan kerang yang membujur dari Tamiang hingga Lho Seumawe menunjukkan indikasi tradisi zaman Mesolitikum, kapak genggam, serpih bilah, dan alat lainnya yang terbuat dari tulang di Aceh yang berasal dari aman Pleistosen. Alat-alat tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memotong, berburu, dan memasak.

Lalu, untuk masa kerajaan penulis menemukan data dari buku “Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh” yang menyebutkan bahwa kerajaan pertama di Aceh adalah Kerajaan Lamri, berlokasi di Aceh Besar. Kemudian data yang penulis dapat juga menjelaskan Kerajaan Lamri berubah nama menjadi Mahkota Alam, kemudian muncul kerajaan baru yakni Darul Kamal, kerajaan Samudera yang bisa dikenal dengan Samudera Pasai, dan kerajaan Majapahit. Penulis juga mendapatkan data mengenai dinamika pemerintahan pada saat kerajaan tersebut berdiri, masa kejayaan kerajaan-kerajaan tersebut, dan alasan runtuhnya kerajaan-kerajaan tersebut.

Dalam pencarian data sejarah Aceh melalui buku-buku di atas, penulis mengalami kendala mengenai kelengkapan isi buku. Tak hanya pada artikel Aceh, kendala kurang lengkapnya isi buku juga penulis alami di beberapa artikel lainnya. Dalam kasus ini, penulis mencari data masa prasejarah Aceh di buku berjudul “Prasejarah” (Gambar 3.1). Buku tersebut memang berisi data prasejarah beberapa daerah di Indonesia. Namun, ketika penulis mencari data prasejarah Aceh, hanya beberapa halaman yang lengkap, sedangkan beberapa halaman tidak tersedia. Kendala seperti ini beberapa kali penulis alami selama menjalani magang WFH karena pandemi Covid-19. Namun, penulis menemukan solusi dengan cara mencari sumber buku lain yang memiliki data yang lebih lengkap seperti data pada buku berjudul “Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh” (Gambar 3.2).

Gambar 3.3 Kendala Berupa Isi Buku Tidak Lengkap



Sumber: Google Buku

Penulis lanjut mencari data mengenai dinamika pemerintahan Aceh ketika zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Berdasarkan jurnal berjudul “Dinamika Sistem Institusi Pendidikan Di Aceh” milik Abdul Hadi, penulis mendapatkan data yang menyebutkan bahwa Belanda tiba di Aceh pada tanggal 21 Juni 1599 untuk menjalani hubungan dagang. Di bidang pendidikan, Belanda melihat pendidikan agama yang sangat kuat di Aceh sehingga Belanda memanfaatkan hal tersebut dengan membuat Ordinasi Guru pada tahun 1905 yang dimuat dalam *Staatsbad* 1905 No.550 yang mengawasi tiap-tiap guru yang mengajar agama. Kemudian pendirian sekolah/madrasah harus izin terlebih dahulu dari Gubernur militer/sipil Belanda.

Gambar 3.4 Jurnal Sumber Riset Penulis



Sumber: Jurnal Ilmiah Peuradeun

Masih berdasarkan jurnal yang sama, disebutkan bahwa Jepang tiba di Aceh pada 12 Maret 1942, Kemudian semua sekolah peninggalan Belanda dijadikan Kokumin Gakko (sekolah negara) dengan masa pendidikan 6 tahun. Bahasa asing yakni Belanda dan Inggris dihilangkan dan huruf arab melayu diganti menjadi huruf Jepang *Katakana* dan *Hirakana*. Jepang mengutamakan pendidikan kemiliteran pada zaman pemerintahannya. Pendidikan kemiliteran yang diberikan pada rakyat adalah *Gyu-gun* (prajurit sukarela), *Heiho* (tentara pembantu), *Tokubetsu* (polisi khusus angkatan laut).

Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Soekarno dan Hatta menginstruksikan Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat. Syafruddin mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi. Namun, untuk alasan keamanan, PDRI dipindah ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh) karena Aceh saat itu merupakan wilayah yang “merdeka” dari penjajahan Belanda. Maka, pada tahun 1949 Aceh sempat menjadi ibukota Indonesia. Aceh sebelumnya merupakan bagian

dari Provinsi Sumatera Utara seperti tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Kemudian Aceh resmi menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dengan hari jadi jatuh pada 7 Desember 1956.

Untuk bagian pemerintahan, dari buku-buku tersebut, penulis mendapatkan daftar nama-nama gubernur Aceh. Diketahui provinsi Aceh telah dipimpin oleh 19 gubernur, 3 penjabat gubernur, 2 pelaksana harian, 1 pelaksana tugas, 1 koordinator residen, dan 1 pemangku koordinator pemerintah. Gubernur pertama provinsi Aceh adalah Teuku Nyak Arif, memulai masa jabatannya pada 3 Oktober 1945 dan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1946, dan gubernur saat ini adalah Nova Iriansyah (5 Juli 2018-5 November 2020).

Setelah mengumpulkan data tentang sejarah dan pemerintahan, penulis lanjut melakukan riset tentang geografi, kependudukan, kesejahteraan, dan ekonomi provinsi Aceh. Keempat bidang ini memiliki sumber riset yang sama yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Data yang diambil dari situs BPS harus berupa data terbaru. Misalnya, untuk data geografi Aceh, penulis mendapatkan data yang menunjukkan luas wilayah Provinsi Aceh adalah 5.795.600 ha atau setara 3,02 persen dari luas Indonesia. Dengan luas tersebut, Aceh memiliki pulau sebanyak 331 pulau. Penulis juga mencari data tentang suhu udara, kelembaban, penyinaran matahari, curah hujan, dan data terkait geografi Aceh lainnya.

Data lainnya tentang kependudukan menunjukkan populasi penduduk Provinsi Aceh mencapai 5,37 jiwa di tahun 2019, meningkat 1,93 persen jika dibandingkan hasil sensus sebelumnya pada tahun 2010 yakni 4,49 juta jiwa.

Komposisi penduduk Aceh terdiri dari 2.683.828 jiwa laki-laki dan 2.687.704 jiwa perempuan. Data di bidang kesejahteraan menunjukkan Pembangunan Manusia di Aceh terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2013, IPM Aceh masih 68,30 kemudian meningkat menjadi 71,90 pada tahun 2019. Di bidang ekonomi data BPS Aceh menunjukkan PRDB (Produk Domestik Regional Bruto) provinsi Aceh atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan Rp 7,26 triliun per tahun. Pada tahun 2015, PDRB Aceh tercatat Rp129,09 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi Rp164,21 triliun rupiah pada 2019. Seluruh data tersebut didapatkan melalui laman BPS Aceh.

Gambar 3.5 Data Suhu Udara Aceh di Laman BPS Aceh

Bulan	Suhu Suhu Udara (Celsius)						Rata-Rata		
	Tercatat			Perkiraan					
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Januari	22,80	21,80	22,22	22,22	22,22	22,43	22,43	22,43	22,43
Februari	22,90	21,70	21,93	22,40	21,22	22,40	22,70	22,70	22,70
Maret	22,80	22,00	22,20	22,20	22,00	22,40	22,00	22,00	22,00
April	22,20	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Mai	22,80	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Juni	22,80	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
Juli	22,80	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
Agustus	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
September	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
Oktober	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
November	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
Desember	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh

Gambar 3.6 Data Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2017-2019

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Juta)		
	2017	2018	2019
Aceh Barat	1.031	1.031	1.031
Aceh Barat Daya	1.049	1.049	1.049
Aceh Besar	2.297	2.297	2.297
Aceh Selatan	1.049	1.049	1.049
Aceh Selatan Daya	1.049	1.049	1.049
Aceh Tenggara	1.049	1.049	1.049
Aceh Tengah	1.049	1.049	1.049
Aceh Utara	1.049	1.049	1.049
Aceh Utara Daya	1.049	1.049	1.049
Bandar Aceh	1.049	1.049	1.049
Gayo Lues	1.049	1.049	1.049
Meulaboh	1.049	1.049	1.049
Suklae	1.049	1.049	1.049
Takeng	1.049	1.049	1.049
Takeng Selatan	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara Daya	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara Selatan	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara Timur	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara Barat	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara Tengah	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara Selatan	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara Timur	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara Barat	1.049	1.049	1.049
Takeng Utara Tengah	1.049	1.049	1.049

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh

Gambar 3.7 Data Indeks Pembangunan Manusia di Aceh Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh

Gambar 3.8 Data PDRB Provinsi Aceh Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh

Namun, dalam pencarian data melalui BPS, penulis mengalami kendala terkait kesediaan data terbaru. Misalnya, ketika penulis mencari publikasi terkait

kebudayaan Aceh di situs BPS Aceh untuk kategori Kependudukan. Ketika penulis mencari data tersebut, publikasi yang ada hanya pada 2018, tidak ada data terbaru tentang kebudayaan Aceh tahun 2019 atau triwulan kesekian di 2020. Namun, untuk mengatasi kendala tersebut, penulis melakukan riset dari jurnal penelitian terkait kebudayaan Aceh atau dari data Kemendikbud.

Selanjutnya untuk riset kategori politik, penulis bertugas mencari data perolehan suara partai politik dalam Pemilu Legislatif DPR RI di tiap-tiap provinsi, termasuk Aceh. Adapun perolehan suara yang dicari adalah sejak Pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu terakhir tahun 2019. Data yang diambil harus berasal dari sumber yang kredibel seperti dari situs milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), jurnal penelitian, buku, bank data milik Kompas di Kompasdata.id, dan situs kredibel lainnya. Sangat tidak diperbolehkan mengambil data dari media lain atau dari situs tidak terpercaya.

Untuk penulisan data perolehan suara pemilu 1995 hingga 2009, penulis tidak perlu menuliskan perolehan suara seluruh partai, melainkan cukup menuliskan partai-partai mana saja yang mendominasi panggung politik provinsi Aceh. Lalu, jika ada partai yang terus-menerus menguasai panggung politik selama beberapa pemilu, penulis bisa merangkumnya menjadi suatu kesimpulan dalam satu paragraf agar tidak terjadi pengulangan. Sedangkan untuk perolehan suara Pemilu tahun 2014 dan Pemilu 2019, penulis diwajibkan mencari data perolehan suara setiap partai secara lengkap dan memasukkan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Hal tersebut dikarenakan data Pemilu 2014 dan 2019 lebih mudah didapatkan dan lebih berpotensi digunakan oleh pembaca sehingga penulis perlu menyajikan data

tersebut dalam bentuk tabel agar mudah dipahami. Namun, penulis tetap menulis data tersebut ke dalam bentuk paragraf, seperti perolehan suara dalam pemilu lainnya.

3.3.3 Penulisan Profil Daerah

Kamath (dalam Santana, 2001, p. 237) menjelaskan bahwa penulisan indepth reporting berusaha menjelaskan kepada pembaca tentang berbagai sisi mengenai objek yang ditulis. Indepth reporting berusaha menceritakan secara padat tapi mendalam mengenai kejadian apa saja yang terjadi. Artikel indepth memiliki tulisan yang panjang, tapi yang dimaksud dengan panjang bukan semata-merta menulis panjang lebar tanpa fokus. Melainkan menceritakan secara detail dan mendalam, tetapi diringkas dalam kalimat yang padat agar mudah dipahami.

Masih dengan contoh artikel yang sama yakni profil daerah Provinsi Aceh, data yang telah didapatkan ditulis ke dalam artikel sesuai dengan kategori yang ada yakni sejarah, geografi, pemerintahan, politik, kependudukan, kesejahteraan, dan ekonomi. Semua data ditulis dengan susunan kalimat yang padat, tapi tetap mendetail. Penulis merangkai data-data terpenting, terbaru, dan yang dirasa informatif menjadi 1-4 paragraf. Dalam proses menulis, penulis sangat menghindari penulisan bertele-tele dan bersifat opini. Meskipun hasil tulisannya panjang, tetapi harus padat dan berisi.

Data yang dimasukkan dalam artikel sejarah berupa tahun, penemuan benda prasejarah, tokoh sejarah, dinamika pemerintahan (peraturan-peraturan, nilai-nilai yang ditekankan, situasi pada saat itu, dan dinamika lainnya), dan perubahan-

perubahan yang terjadi pada masa penjajahan. Dalam penulisan artikel Aceh kategori sejarah, data tentang sejarah sejak zaman prasejarah hingga terbentuknya provinsi Aceh tersebut dirangkum dalam 1-4 paragraf per periode. Sebagai contoh berikut pembagian paragraf pada tiap-tiap periode dalam artikel sejarah Provinsi Aceh.

Sejarah

— Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang kaya akan situs prasejarah. Seperti ditulis dalam buku “Prasejarah Indonesia”, di kabupaten Aceh Tamiang telah ditemukan bukit kerang (Kjokkenmoddinger) yang kini diberi nama situs Bukit Kerang Pangkalan. Manusia prasejarah Austromelanosoid ditemukan di daerah Bukit Tamiang, Aceh dengan ciri-ciri tinggi tubuh sekitar 153cm, bentuk tengkorak lonjong, berjenis kelamin perempuan, usia sekitar 40 tahun, bentuk hidung lebar, rahang bawah dan ukuran giginya kecil.

Zaman
Prasejarah
(dua
paragraf)

— Penemuan artefak-artefak dan fosil manusia dan binatang serta tumpukan kerang yang membujur dari Tamiang hingga Lho Seumawe menunjukkan indikasi tradisi zaman Mesolitikum. Artefak tersebut menunjukkan adanya kehidupan berkelompok dan berburu. Ditemukan pula kapak genggam, serpih bilah, dan alat lainnya yang terbuat dari tulang di Aceh yang berasal dari zaman Pleistosen. Alat-alat tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memotong, berburu, dan memasak.

Menurut buku “Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh”, kerajaan pertama yang menduduki Aceh adalah Kerajaan Lamri, berlokasi di Aceh Besar. Tertulis dalam prasasti Tanjore (1030) yang memuat laporan ekspedisi Rajendracola Dewa I menyebutkan bahwa Kerajaan Lamri merupakan daerah takluk Sriwijaya. Pada masa kejayaannya, kerajaan Lamri menyebarkan ajaran Islam di Aceh.

Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Lamri adalah runtuhannya bangunan yang berlokasi 500 meter dari desa Krueng Raya, Aceh. Kemudian terdapat pula penemuan berupa benteng yang diberi nama Benteng Indraparta. Pada abad ke-15 pusat Kerajaan Lamri dipindahkan ke Makota Alam yang sekarang dinamai Kuta Alam, yang terletak di sisi utara Krueng Aceh di Lembah Aceh. Pemindahan ini disebabkan adanya serangan dari Pidie dan pendangkalan muara sehingga dapat mengganggu aktivitas pelayaran Kerajaan Lamri. Sejak itu Kerajaan Lamri lebih dikenal dengan Kerajaan Makota Alam.

Pada penghujung abad ke-15 berdirilah sebuah kerajaan baru yakni Darul Kamal sehingga terdapat dua kerajaan pada saat itu, Mahkota Alam dan Darul Kamal. Dua kerajaan tersebut dipisahkan oleh Krueng Aceh (sungai Aceh). Kedua kerajaan tersebut tidak pernah hidup rukun, peperangan sering terjadi tapi tak satupun diantaranya yang dapat menghancurkan lawannya. Namun, akhirnya

Zaman
Kerajaan
(empat
paragraf)

peperangan usai setelah pemimpin Mahkota Alam, Sultan Saymsu Syah Putera Munawar Syah menjodohkan puteranya Ali Muhayat Syah dengan putri kerajaan Darul Kamal.

Kerajaan selanjutnya yang pernah berdiri di Aceh adalah Kerajaan Samudera. Hoesien Djadiningrat mengatakan kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1270-1275. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Sultan Malik Al Saleh dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Muhammad Malik Al Zahir. Dalam Negara Kertagama dijelaskan bahwa Kerajaan Samudera termasuk ke dalam daftar-daftar kerajaan yang tunduk atas kekuasaan Majapahit. Kemudian, hubungan Kerajaan Samudera dengan kerajaan Lamri tidaklah hamonis, kedua kerajaan ini diketahui sering berperang. Seiring berakhirnya abad ke-15, peranan Mojopahit di nusantara mulai berkurang, apalagi terhadap daerah-daerah yang lokasinya jauh dari pusat kerajaan Mojipahit seperti Kerajaan Samudera. Maka, Kerajaan Samudera mulai mengambil alih penuh kekuasaan dan menguasai jalur lalu lintas perdagangan di Selat Malaka.

Menurut jurnal “Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam”, pada awalnya Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederick de Houtman datang ke Aceh pada tanggal 21 Juni 1599 untuk menjalani hubungan dagang. Kedatangan Belanda disambut baik oleh Sultan Sultan Alauddin Riayat Syah Al Mukammil. Namun hubungan dagang antar Aceh

Zaman
Penjajahan
Belanda
(dua
paragraf)

dan Belanda dirusak oleh Portugis yang khawatir hubungannya dagang Aceh retak dan keuntungan perdagangan mereka akan berkurang. Akibatnya, Sultan Aceh menyerang pedagang-pedagang Belanda. Cornelis de Houtman yang menjadi pimpinan Belanda bersama dengan sebahagian anak buahnya tewas, sedangkan saudaranya Frederick de Houtman dan sisanya ditawan oleh tentara Aceh.

Sejak itu hubungan Aceh dengan Belanda retak dan Belanda mulai berusaha menguasai Aceh, terutama mengambil alih perdagangan jalur laut di Aceh. Belanda mengambil alih perdagangan lada di Aceh dan mengirimkan pasukan tentaranya ke pulau Nias untuk menghalangi Aceh melakukan perdagangan budak di pulau itu. Pada saat itu pendidikan agama sangat kenal di Aceh. Belanda memanfaatkan hal tersebut dengan membuat Ordinasi Guru pada tahun 1905 yang dimuat dalam Staatsbad 1905 No.550 yang mengawasi tiap-tiap guru yang mengajar agama. Kemudian pendirian sekolah/madrasah harus izin terlebih dahulu dari Gubernur militer/sipil Belanda (Dinamika Sistem Institusi Pendidikan Di Aceh).

Seperti tertulis dalam buku “Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh”, setelah Belanda menyerah atas Jepang pada tahun 1942, pasukan tentara Jepang segera mendarat di Aceh pada 12 Maret 1942 untuk mengambil alih kekuasaan. Pendaratan dilakukan

Zaman
Penjajahan
Jepang
(tiga
paragraf)

di tiga titik yakni Peureulak (Aceh Timur), Keureng Raya (Aceh Besar), dan Sabang. Dalam membentuk sistem pemerintahan Aceh, Jepang tidak banyak mengadakan perubahan sistem yang sebelumnya telah dibentuk Belanda. Struktur pemerintahan yang dibuat Belanda masih digunakan hanya saja nama-namanya diganti dengan nama Jepang. Bidang pendidikan pada masa pemerintahan Jepang mengalami kemerosotan.

Pada masa ini sekolah lanjutan yang dikelola oleh swasta dilarang beroperasi. Hanya ada dua sekolah yakni Shu Gakko (sekolah lanjutan 5 tahun) dan Sihang Gakko (sekolah guru 3 tahun). Kemudian semua sekolah peninggalan Belanda dijadikan Kokumin Gakko (sekolah negara) dengan masa pendidikan 6 tahun. Bahasa asing yakni Belanda dan Inggris dihilangkan dan huruf arab melayu diganti menjadi huruf Jepang Katakana dan Hirakana.

Jepang mengutamakan pendidikan kemiliteran pada zaman pemerintahannya. Pendidikan kemiliteran yang diberikan pada rakyat adalah Gyu-gun (prajurit sukarela), Heiho (tentara pembantu), Tokubetsu (polisi khusus angkatan laut). Pemerintah Jepang termasuk cukup memperhatikan bidang agama di Aceh, mengingat wilayah ini didominasi masyarakat beragama Islam. Jepang membentuk Majelis Agama Islam Kebaktian Asia Timur Raya (MAIBKATRA), Pengadilan Agama, dan pengangkatan penasehat pemerintah dalam urusan agama Islam.

Zaman
Awal
Kemerdeka-
an
(dua
paragraf)

Ketika Jepang menyerah atas sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha memasuki Aceh dan kembali menguasai daerah tersebut. Namun, rakyat Aceh mempertahankan wilayahnya dengan melancarkan Perang Sabil terhadap Belanda. Keterbatasan Aceh saat itu adalah pada hal finansial dan komunikasi lantaran saat itu radio diambil alih Belanda sehingga Aceh kesulitan menerima kabar kemerdekaan. Maka, ketika Soekarno dan Hatta ditawan Belanda pada 1948 dan RRI Yogyakarta dibungkam, rakyat Aceh membangun pemancar radio perjuangan, disebut dengan Radio Rimba Raya.

Sebelum ditawan Belanda pada 19 Desember 1948, Soekarno dan Hatta menginstruksikan Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat. Syafruddin mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi. Namun, untuk alasan keamanan, PDRI dipindah ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh) karena Aceh saat itu merupakan wilayah yang “merdeka” dari penjajahan Belanda. Maka, pada tahun 1949 Aceh sempat menjadi ibukota Indonesia. Aceh sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara seperti tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Kemudian Aceh resmi menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dengan hari jadi jatuh pada 7 Desember 1956.

Untuk penulisan kategori pemerintahan, data mentah yang penulis dapatkan berbentuk tabel. Penulis bertugas menulis data mentah yang telah didapatkan dalam proses riset tersebut ke dalam bentuk paragraf. Kategori pemerintahan disusun dengan singkat dan tidak banyak menjelaskan dinamika seperti pada kategori sejarah. Pada kategori ini, penulis hanya menuliskan siapa saja nama-nama yang pernah menjadi gubernur Aceh berikut masa jabatannya, kemudian penulis juga bertugas merangkum berapa jumlah gubernur, pejabat gubernur, pelaksana harian, pelaksana tugas, koordinator residen, dan pemangku koordinator pemerintah. Tidak hanya berpatok pada gubernur saja, penulis juga menuliskan data tentang jumlah wilayah administratif (kabupaten/kota, kecamatan, dan desa), jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perbandingan PNS laki-laki dan perempuan, serta jumlah anggota DPRD Aceh. Berikut adalah contoh paragraf penyajian gubernur Aceh, jumlah wilayah administratif, jumlah PNS, dan jumlah DPRD Aceh.

PEMERINTAHAN

Penulisan
jumlah
dan jenis
pemimpin

Terhitung sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, provinsi Aceh telah dipimpin oleh 19 gubernur, 3 pejabat gubernur, 2 pelaksana harian, 1 pelaksana tugas, 1 koordinator residen, dan 1 pemangku koordinator pemerintah.

Penulisan
daftar
pemimpin

Gubernur pertama provinsi Aceh adalah Teuku Nyak Arif. Dia memulai masa jabatannya pada 3 Oktober 1945 dan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1946. Kemudian Aceh dipimpin oleh Teuku Daud Syah (1946-1947), Teungku Daud Beureu'eh menjabat dua kali (1947-1949 dan 1950-1951).

Jumlah daerah administratif di Provinsi Aceh terdiri dari 23

Penulisan
jumlah
wilayah
administra
tif

kabupaten, 289 kecamatan dan 6.514 desa. Kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak adalah Aceh Utara (27 kecamatan) dan Aceh Timur (24 kecamatan). Sementara itu, Kota Sabang memiliki daerah administrasi paling sedikit, yaitu 2 kecamatan dan 18 desa.

Jumlah PNS Aceh pada tahun 2019 adalah 129.989 pegawai. Dari jumlah tersebut, komposisi pegawai mayoritasnya adalah PNS

Penulisan
jumlah
Pegawai
Negeri
Sipil

pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) sebesar 64,46 persen, sedangkan berpendidikan diploma (D1,D2,D3, dan D4) adalah 16,58 persen. Sisanya adalah tamatan SLTA sebesar 17,92 persen, pendidikan SLTP 0,66 persen, dan tingkat pendidikan SD sebesar 0,38%.

Persentase anggota DPRD Aceh tahun 2019 didominasi Partai Aceh yaitu sebesar 22 persen, kemudian diikuti oleh Partai Demokrat sebesar 12,35 persen, Partai Golkar sebesar 11,11 persen, Partai Gerindra sebesar 9,88 persen serta PKS, PPP, PAN dan PNA masing-masing sebesar 7,41 persen .

Penulisan
jumlah
anggota
DPRD

Selanjutnya untuk kategori geografi, kependudukan, kesejahteraan, dan ekonomi, data yang telah didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh kemudian disusun menjadi bentuk paragraf. Data tersebut tidak hanya serta-merta ditulis atau di salin dari laman BPS, melainkan penulis bertugas membuat gambaran melalui perbandingan. Misalnya untuk geografi Aceh, penulis yang telah mendapatkan data luas Aceh kemudian membandingkan luas tersebut dengan luas

Indonesia, sehingga penulis dapat memberi gambaran kepada pembaca tentang persentase luas Aceh jika dibandingkan dengan luas Indonesia. Berikut adalah contoh paragraf dalam kategori geografi yang berisi perbandingan luas wilayah.

Geografi

Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ sampai $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ sampai $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur. Posisi Aceh di bagian paling barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah keseluruhan 5.795.600 ha atau setara 3,02 persen dari luas Indonesia. Dengan luas tersebut, Aceh memiliki pulau sebanyak 331 pulau.

Lalu, untuk kategori kependudukan, penulis yang sebelumnya telah mendapatkan data jumlah penduduk Aceh tahun tahun 2018 dan 2019 kemudian membandingkan peningkatan atau penurunan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Jika data berupa angka dalam bentuk tabel bukan paragraf, maka penulis akan menghitung perbandingan tersebut secara manual dengan menggunakan kalkulator gawai. Di bawah ini adalah contoh paragraf yang berisi perbandingan jumlah penduduk Aceh tahun 2019 dengan data sebelumnya pada sensus 2010, yang penulis bandingkan secara manual melalui kalkulator gawai.

Kependudukan

Populasi penduduk Provinsi Aceh mencapai 5,37 jiwa di tahun 2019, meningkat 1,93 persen jika dibandingkan hasil sensus sebelumnya pada tahun 2010 yakni 4,49 juta jiwa. Komposisi

penduduk Aceh terdiri dari 2.683.828 jiwa laki-laki dan 2.687.704 jiwa perempuan.

Begitu pula untuk kategori kesejahteraan. Ketika penulis mencari data mengenai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh, kemudian data yang muncul berupa data mentah dalam bentuk tabel. Maka, penulis bertugas membuat data mentah tersebut menjadi bentuk yang lebih menarik untuk dibaca sehingga tidak terkesan hanya menyalin dari BPS saja. Penulis juga melakukan perbandingan IPM Aceh dan data lainnya dengan menggunakan kalkulator gawai. Berikut adalah contoh satu paragraf pada kategori kesejahteraan yang berisi perbandingan peningkatan IPM Aceh tahun 2013 dengan tahun 2019.

Kesejahteraan

Pembangunan Manusia di Aceh terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2013, IPM Aceh masih 68,30 kemudian meningkat menjadi 71,90 pada tahun 2019.

Sama seperti geografi, kesejahteraan, dan kependudukan, kategori ekonomi juga berisi data-data mentah dari BPS Aceh seperti Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Provinsi Aceh, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Ekspor Impor, laju pertumbuhan ekonomi, distribusi sektor terhadap PDRB Aceh, dan inflasi. Data yang penulis dapat dari BPS Aceh berupa bahan mentah berbentuk tabel. Maka, penulis merangkai kembali data mentah tersebut ke dalam bentuk paragraf, dan membuat perbandingan agar lebih menarik untuk dibaca.

Berikut adalah contoh paragraf berisi perbandingan nilai ekspor Aceh tahun 2015-2019.

Ekonomi

Nilai ekspor luar negeri Aceh sempat merosot tajam dari sekitar 93,34 juta dollar AS pada tahun 2015 menjadi hanya sekitar 22,87 juta dollar pada tahun 2016, namun kembali meningkat di tahun 2017 menjadi 77,28 juta dollar AS, kemudian menjadi 138,63 juta dollar AS pada 2018, dan menjadi 166,56 juta dollar pada 2019.

Setelah menuliskan seluruh kategori, penulis bertugas menulis bagian kutipan, prolog, dan fakta singkat. Kutipan merupakan kalimat pembuka atau pengantar tentang provinsi tersebut. Letak kutipan adalah tepat di bawah judul dengan posisi rata tengah. Sama seperti kutipan, prolog juga merupakan paragraf pembuka yang berisi informasi-informasi potongan dari beberapa kategori yang kemudian digabungkan menjadi 3-4 paragraf pendek. Sedangkan fakta singkat merupakan informasi singkat dan paling dasar tentang provinsi tersebut seperti ibu kota, hari jadi, dasar hukum, luas wilayah, jumlah penduduk, dan pasangan kepala daerah.

Berikut adalah contoh penulisan kutipan, prolog, dan fakta singkat provinsi Aceh.

KUTIPAN

Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Dijuluki Kota Serambi Mekkah karena dominasi masyarakat pemeluk agama Islam yang sangat besar, mencapai 4.413.244 jiwa (98,19 persen).

PROLOG

Aceh pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara seperti tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Kemudian Aceh resmi menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dengan hari jadi jatuh pada 7 Desember 1956.

Provinsi ini memiliki motto “Pancita” yang berasal dari bahasa Sanskerta berarti “Lima Cita-cita” yakni keadilan, kepahlawanan, kemakmuran, kerukunan, dan kesejahteraan. Provinsi dengan ibukota Banda Aceh ini memiliki luas wilayah mencapai 5.795.600 ha atau setara 3,02 persen dari luas Indonesia.

Aceh memiliki 23 kabupaten, 289 kecamatan dan 6.514 desa. Struktur perekonomian Provinsi Aceh didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

FAKTA SINGKAT

Ibu kota

Banda Aceh

Hari Jadi

7 Desember 1956

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956

Luas Wilayah

5.795.600 km²

Jumlah Penduduk

5,37 jiwa (2019)

Pasangan Kepala Daerah

Gubernur Nova Iriansyah

Setelah selesai menuliskan seluruh isi artikel, penulis diwajibkan membuat referensi di bagian paling bawah artikel. Referensi sendiri dikelompokkan menjadi empat kategori yakni arsip berita Kompas, buku, jurnal, dan situs internet. Semua referensi ditulis berdasarkan standar penulisan yang ditetapkan oleh Kompas sendiri. Penulis wajib menyertakan *link* yang disematkan dalam judul berita, buku, jurnal, dan situs internet (*hyperlink*) untuk memudahkan pembimbing saat melakukan pengecekan data. Berikut adalah contoh penulisan referensi pada artikel profil daerah Provinsi Aceh.

Arsip Berita Kompas

[Mengenal Provinsi Aceh](#), Kompas, 11 Januari 2020, hal.1

[Rekapitulasi KPU: Demokrat Raih Suara Tertinggi di Aceh](#),

Kompas, 15 Mei 2019, hal.1

Buku

Ibrahim. Muhammad. 1991. [Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh](#). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ibrahim. Muhammad. 1977. [Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh](#). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Diansyah, Arfan. 2019. [Prasejarah Indonesia](#). Medan: Yayasan Kita Menulis.

Jurnal

Anwar. 2017. [Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam](#). *Jurnal ADABIYA*. Vol 9 (1).

Hadi, Abdul. 2014. [Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh](#). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. Vol 2 (3).

Situs Internet

[Master File Wilayah Provinsi Aceh 2018](#), Badan Pusat Statistik

[Statistik Daerah Provinsi Aceh 2020](#), Badan Pusat Statistik

[Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten, 13 suku dan memiliki 11 bahasa daerah](#), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

[Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut](#), Pusat

Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama

[Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2019](#), Badan Pusat Statistik

[Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2014](#), Badan Pusat Statistik

[Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2019](#), Badan Pusat Statistik

Usai menuliskan seluruh isi artikel beserta referensinya, penulis lanjut mengerjakan deskripsi Undang-undang pembentukan provinsi, dalam hal ini berarti deskripsi Undang-undang pembentukan Provinsi Aceh. Penulis sebelumnya akan mengunduh file Undang-undang pembentukan provinsi tersebut melalui laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH RI), atau Badan Pengurus Keuangan (BPK) RI. Setelah mengunduh file, barulah penulis membuat deskripsi Undang-undang.

Deskripsi tersebut berupa informasi tentang judul Undang-undang, waktu disahkan dan diundangkannya Undang-undang, siapa yang mensahkan dan mengundangkan, dimana UU tersebut disahkan dan diundangkan, alasan pembentukan UU tersebut, penjabaran singkat terkait seluruh BAB atau pasal dalam UU, jumlah halaman dan pembagian BAB/halaman penjelas, ringkasan pasal-pasal yang menjadi poin utama, dan sumber berkas Undang-undang tersebut. Tujuan dibuatnya deskripsi Undang-undang adalah untuk memberi gambaran kepada pembaca sebelum membaca Undang-undang tersebut, agar lebih mudah dipahami dan dengan mudah mencari poin yang ingin dibaca.

Setelah membuat artikel, deskripsi Undang-undang, dan mengunduh file Undang-undang pembentukan provinsi, penulis mengirimkan ketiga file tersebut melalui surel kepada pembimbing. Waktu pengumpulan adalah setiap hari Jumat, tidak ada batas waktu pengumpulan pada hari Jumat tersebut. Untuk artikel Provinsi Aceh telah penulis selesaikan pada Kamis malam, kemudian penulis mengirimkan seluruh file (artikel, deskripsi Undang-undang, dan mengunduh file Undang-undang pembentukan provinsi) pada Jumat, 27 November 2020 pukul 10:35 pagi kepada pembimbing, Antonius Purwanto, melalui surel.

Gambar 3.9 Pengiriman Tugas Magang Provinsi Aceh



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis

3.3.4 Tahap Penyuntingan

Setelah mengirimkan seluruh tugas kerja magang pada hari Jumat, pembimbing akan melakukan pengecekan di hari yang sama. Jika ada yang perlu diperbaiki, pembimbing akan langsung menghubungi penulis melalui Whatsapp. Namun, jika revisi minor, dalam beberapa kasus pembimbing merevisi sendiri artikel yang telah penulis kirimkan, dalam artian pembimbing juga berperan sebagai editor.

Dalam sub bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai proses penyuntingan sebelum artikel dan deskripsi Undang-undang tersebut diunggah di laman Kompaspedia rubrik Profil Daerah. Menurut Yunus (2012, p. 86), tahap penyuntingan naskah berita disebut juga sebagai proses *editing*. Tujuan dari tahap penyuntingan adalah untuk mengetahui dan melakukan pengecekan kembali terhadap berita agar isi berita sesuai dengan tujuan komunikasi yang diharapkan oleh jurnalis. Di sisi lain, tak hanya melakukan pengecekan terhadap substansi, tahap pengecekan ini juga berfungsi mengecek masalah teknis, seperti

penggunaan kata, salah huruf (*typo*), penyusunan paragraf, penulisan referensi, jenis *font*, ukuran *font*, warna tulisan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar artikel benar-benar siap untuk diunggah dan disajikan kepada masyarakat.

Sebagai contoh, penulis pernah mendapatkan revisi untuk artikel provinsi Sumatera Selatan. Pada hari Selasa, 22 November 2020 pukul 20:37 malam pembimbing penulis, Antonius Purwanto, menghubungi penulis lewat Whatsapp. Pembimbing mempertanyakan data Pemilu Legislatif DPR RI Sumatera Selatan tahun 2014 karena data yang penulis berikan tidak akurat. Pembimbing menghubungi penulis di malam hari yang mana sudah bukan jam kerja, kemudian pembimbing juga meminta penulis untuk mengumpulkan revisi di malam itu juga. Sedangkan penulis juga sedang mengerjakan artikel Provinsi Aceh. Sebenarnya penulis sudah mengirimkan artikel tersebut dari minggu sebelumnya, tetapi informasi terkait revisi penulis terima terlalu berdekatan dengan tanggal *deadline*. Sehingga penulis terburu-buru mengerjakan revisi tersebut sementara artikel Provinsi Aceh harus ditunda terlebih dahulu.

*Ini data perolehan pileg 2014 (pembimbing mengirimkan file hasil pemilu 2014 Sumatera Selatan)
data tabel perolehan suara sumsel 2014 yang kamu bikin
sumbernya dari mana ya? Minta tolong dicari ya.*

Setelah peneliti telusuri, data Pemilu Legislatif DPR RI 2014 Provinsi Sumatera Selatan yang peneliti ambil hanya dari Daerah Pilih I (Dapil I), sedangkan

saat itu di Sumatera Selatan terdapat dua Dapil. Maka, penulis mengkomunikasikan kesalahan data tersebut dengan pembimbing dan memperbaikinya. Sebelumnya, data Dapil I tersebut penulis dapatkan dari berita *Kompas.com*, kemudian pembimbing meminta penulis untuk mengambil data dari file hasil pemilu 2014 Sumatera Selatan yang dikirimkan melalui Whatsapp.

3.4 Kendala dan Solusi

Selama melakukan kerja magang di Litbang Kompas tepatnya Kompaspedia dalam rubrik Profil Daerah sebagai riset/*researcher*, tentunya seluruh pekerjaan penulis tidak berjalan lancar begitu saja. Ada kendala-kendala saat melakukan riset data. Namun, terlebih dari pada itu, penulis juga menemukan solusi dari kendala-kendala tersebut, sehingga pada akhirnya artikel penulis bisa diunggah di laman Kompaspedia dalam rubrik Profil Daerah. Kendala-kendala yang penulis alami sebagai berikut.

1. Pandemi Covid-19 mengharuskan penulis bekerja di rumah dan melakukan riset daring. Riset daring sendiri tidak begitu lengkap, banyak sekali buku yang halamannya tidak tersedia. Sebagai solusi, penulis melakukan riset melalui jurnal penelitian atau mengambil data dari *Kompasdata.id* dan artikel di *Kompas.com*.
2. Kelengkapan data tiap provinsi berbeda, tidak semua provinsi memiliki data yang lengkap dan *up to date*. Contohnya, daerah-daerah seperti Kepulauan Riau dan Aceh kurang memiliki data yang lengkap. Kebanyakan data hanya sampai tahun 2018, sedangkan

penulis diharuskan mencari data terbaru. Sebagai solusi, penulis mencari data dari situs BPS provinsi tersebut atau dari situs kredibel lainnya seperti situs pemerintah atau situs milik Bank Indonesia.

3. Pemberitahuan revisi terlalu mendadak. Pemberitahuan revisi pada hari Jumat dan permintaan pengumpulan revisi pada hari Senin yang mengharuskan peneliti bekerja pada hari Sabtu dan Minggu. Jika ada revisi mendadak seperti ini, solusi dari pembimbing adalah mengundur batas pengumpulan artikel yang seharusnya dikerjakan pada minggu tersebut dan mendahulukan pengerjaan revisi.